



WALI KOTA BINJAI
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 100.3.3.3/16/I/2024

TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I bagian J angka 1 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atas usul PPKD selaku BUD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I bagian J angka 2 huruf b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

15. Peraturan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
19. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Nomor 800/3915/BPKPAD/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Usulan Nama-Nama Calon Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan pada masing-masing SKPD Kota Binjai Tahun 2024;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda tanggal 4 Desember 2023 Hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI.

KESATU : Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Januari 2024;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 8 Januari 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Binjai;
2. Inspektur Daerah Kota Binjai;
3. Kepala BPKPAD Kota Binjai; dan
4. Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Binjai.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 100.3.3.3/16/I/2024
 TENTANG
 BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BINJAI

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

NO	NAMA SKPD	NAMA / NIP		ATASAN LANGSUNG
		BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah Kota Binjai dan Wali Kota/Wakil Wali Kota	FILDA RISKI LESTARI NIP. 19790725 201001 2 012	ISNAINI, SH NIP. 19800519 200801 2 003	Sekretaris Daerah Kota Binjai
2	Sekretariat DPRD Kota Binjai	-	IVAN SYAHPUTRA, SE NIP. 19790905 200604 1 004	Sekretaris DPRD Kota Binjai
3	Inspektorat Daerah Kota Binjai	-	ISMAL NIP. 19780208 201001 1 013	Inspektur Daerah Kota Binjai
4	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai	SRI RAHAYU NIP. 19781203 199903 2 001	NUR KHAIRINA, SE NIP. 19930320 202012 2 009	Direktur R.S.U.D. Dr. R.M. Djoelham Binjai
5	Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Dr.R.M.Djoelham Kota Binjai		NONI HANDAYANI, SE NIP. 19871119 202012 2 003	Direktur R.S.U D. Dr. R.M. Djoelham Binjai
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	-	IIP KURNIA PRAJA NIP. 19850106 201001 1 007	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai	RUDI NUGROHO NIP. 19680720 200701 1 005	FAKIH MARDANI LUBIS, SE NIP. 19860507 202012 1 003	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai	AL IKHDAR NIP. 19750422 200701 1 005	EZRA CHRISTINA MARPAUNG, S.A.B NIP. 19890411 201101 2 011	Kepala BPBD Kota Binjai

NO	NAMA SKPD	NAMA / NIP		ATASAN LANGSUNG
		BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	
1	2	3	4	5
9	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	ELIANI, A.Md NIP. 19790213 200604 2 010	MONARITA NIP. 19830413 200901 2 001	Kepala BPKPAD Kota Binjai
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai	-	NURDIANA HIDAYATI NIP. 19851111 201001 2 011	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai	-	LINDA HANDAYANI Br. SITEPU, AM.Keb NIP. 19860731 201704 2 006	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai
12	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai	HIMAWAN WAHYUDI, SE NIP. 19811203 200801 1 001	JULINA ARIANI, S, SE NIP. 19800723 200901 2 008	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai	MUHAMMAD DENI NIP. 19730205 201001 1 004	MALASARI DEVITA NIP. 19841029 200901 2 001	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
14	Dinas Perhubungan Kota Binjai	ZULKHAIR FAUZI NIP. 19761102 200901 1 001	MUHAMMAD SYOFYAN NIP. 19680620 198909 1 003	Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai	-	SELLA APRIANI, S.Ak NIP. 19960415 201903 2 003	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
16	Dinas Kesehatan Kota Binjai	SPIKA ADIANTI SIMATUPANG, S.Kep NIP. 19820917 200801 2 003	MARIA KRISTINA. W. SITORUS, SST, M.K.M NIP. 19820529 201001 2 030	Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai	BUDIARTO NIP. 19760217 200701 1 002	UTAMI PUJIANTI, A.Md NIP. 1981002 201001 2 031	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai

NO	NAMA SKPD	NAMA / NIP		ATASAN LANGSUNG
		BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	
1	2	3	4	5
18	Dinas Pendidikan Kota Binjai	-	EIS HARDAYANI, S.Kom NIP. 19810828 201101 2 001	Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	DANI EFENDI NIP. 19731211 200901 1 001	JIMMY SIMATUPANG, A.Md NIP. 19760206 200903 1 004	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
20	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai	SYAMSIDAR NIP. 19810814 200901 2 001	AFRIZAL SYAHPUTRA, SE NIP. 19950412 202012 1 006	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai	-	YULI, SE NIP. 19760716 199603 1 003	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai
22	Dinas Pariwisata Kota Binjai	-	SITI MAULIDIAH ALI, S.Pd NIP. 19831218 201406 2 001	Kepala Dinas Pariwisata Kota Binjai
23	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Binjai	AGUS SALIM, SE NIP. 19690317 200701 1 004	LUTFI ANSARI DARMA, A.Md NIP.19841210 200903 1 005	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Binjai
24	Dinas Sosial Kota Binjai	-	NILA SUHERAWATI, SE NIP. 19791029 200604 2 014	Kepala Dinas Sosial Kota Binjai
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	SONNY FEBRIAN, ST NIP. 19770626 201001 1 015	RAMADANI SARAGIH, S.Pd NIP. 19880506 201001 1 006	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai	-	ENDA RAHAYU, S.Kom NIP. 19910330 201903 2 004	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
27	Dinas Perpustakaan Kota Binjai	-	DARWITA NIP. 19720613 200901 2 002	Kepala Dinas Perpustakaan Kota Binjai

NO	NAMA SKPD	NAMA / NIP		ATASAN LANGSUNG
		BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	
1	2	3	4	5
28	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai	-	SAUMANDA TAZILIO IERHASY, SE NIP. 19900328 201503 1 001	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai	-	NURMAYA RISKA DEWI, SE NIP. 19980407 202203 2008	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
30	Kecamatan Binjai Kota	-	JAUHARI NIP. 19731108 200502 1 001	Camat Binjai Kota
31	Kecamatan Binjai Timur	-	ZULKARNAIN SIREGAR NIP. 19701013 201406 1 001	Camat Binjai Timur
32	Kecamatan Binjai Utara	-	PAINO NIP. 19760605 200801 1 002	Camat Binjai Utara
33	Kecamatan Binjai Selatan	-	FEBRI UMayA REKSANA MS NIP. 19800210 200801 2 002	Camat Binjai Selatan
34	Kecamatan Binjai Barat	-	AHMAD YANI, SE NIP. 19740926 201212 1 001	Camat Binjai Barat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH